



JURNAL ILMU PENDIDIKAN

Halaman Jurnal: <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/sokoguru>

Halaman UTAMA: <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php>



KONFLIK SOSIAL ANTARA WARGA KELURAHAN DARA DAN KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN RASANA'E BARAT KOTA BIMA

Mansyur, Hermansyah, Sudirman, Anas Djumati
IAIN Fattahul Muluk Papua, Kota Jayapura, Propinsi Papua

Email: mansyursonk91@gmail.com

hermansyah67pps@gmail.com

iainsudirman@gmail.com

anasumar138@gmail.com

ABSTRACT

The study aims at discovering the causing factors of social conflict between the people in Dara village in Tanjung village of west Rasana'e subdistrict in Bima city, and the efforts of solution of social conflict between the people in Dara villag in Tanjung village of west rasana'e subdistrict in Bima city.

The type of of this study is destriptive qualitative with a case study approach. The determination of the informant was conducted by employing descriptive qualitative sampling technique. Data were collected by employing descriptive qualitative conducted in several stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion.

The results of the study reveal that (i) the causes of social conflict between the people in Dara village in Tanjung village of west Rasana'e subdistrict in Bima city are: firs, conflict of high school students of SMA Muhammadiyah among SMA PGRI in Bima city, the youth, and the ethnic of the village. Second, bullyng between the teenagers of Dara and teenagers of Tanjung in Football Match in Mangge Maci Field Court, (ii) the efforts of solution of social conflict between the people of Dara village and Tanjung village of west Rasana'e subdirsct in Bima city were the prominent religious figure, peominent people, customs figures, Kapolres Bima city, Mayor of Bima the head of Karang Taruna, and the Head of the village.

Key Words: social conflict, people of Dara village, people of Tanjung village

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sosial Antara Warga Kelurahan Dara Dan Warga Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, dan Bagaimana upaya penyelesaian Konflik Sosial antara Warga Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung di Kecamatan Rasana'e Kota Bima.

Jenis penelitian yaitu dekriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penentuan informan dilakukan *Purvosive Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data menggunakan dekriptif kualitatif dengan tahapan; Reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Penyebab terjadinya konflik sosial antara warga Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima yaitu; *Pertama* masalah Konflik anak SMA Muhammadiyah antar SMA PGRI Kota Bima, pemuda, dan etnis Kelurahan. *Kedua* Masalah Pelecehan Antar Pemuda Dara Dan Pemuda Tanjung Pada Saat Permainan Bola Di Lapangan Mangge Maci. (ii) upaya penyelesaian Konflik Sosial antara Warga Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung di Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Kapolres Kota Bima, walikota Bima, ketua karang taruna, dan kepala Kelurahan.

Kata Kunci: Konflik sosial, Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang memiliki masyarakat majemuk. Secara horizontal Indonesia ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat serta perbedaan kedaerahan. Perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat diselesaikan jika kita semua memiliki maksud dan tujuan yang sama.

Adanya perbedaan tersebut seringkali menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang dapat menimbulkan diintegrasikan terhadap Negara kesatuan Republik Indonesia. Pluralitas atau kemajemukan masyarakat Indonesia adalah realitas yang tidak dapat dipungkiri karena memiliki akar historis yang panjang. Masyarakat plural atau majemuk merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dimana masing-masing sub sistem yang terikat ke dalam ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Konflik sosial pada masyarakat majemuk Indonesia sifatnya sangat tajam, karena di samping berbeda secara horizontal, kelompok-kelompok itu juga berbeda secara vertikal menunjukkan adanya polarisasi.

Konflik sosial sebenarnya adalah suatu situasi yang terjadi manakala terdapat perbedaan, tumpang tindih kepentingan dan kehendak. Perbedaan yang terjadi bisa saja sangat bertolak belakang atau berlawanan sehingga menimbulkan bentrokan, atau sekedar perbedaan arah yang menimbulkan kesalahpahaman. Konflik sosial pada umumnya merupakan suatu gejala yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa wujud dari konflik sosial yang dapat dilihat secara kasat mata, antara lain marah, memaki-maki, berkelahi, pengaduan ke pengadilan, unjuk rasa dan lain-lain. Bila konflik sosial dibiarkan semakin dalam dan luas, akan berdampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan memicu disintegrasi sosial yang pada akhirnya menghambat proses pembangunan daerah dan berdampak terhadap kondisi ketahanan wilayah yang merupakan penyanggah ketahanan Nasional.

Kota Bima salah satu Kota yang terletak di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang berada dari sebuah pulau yaitu pulau Sumbawa, di antara Kabupaten-kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Bima merupakan Kota yang paling majemuk dan plural. Realitas ini dibuktikan dengan banyaknya etnik atau suku yang mendiami pulau Sumbawa. Dan di antara etnik yang mendiami pulau Sumbawa yaitu Etnik Sasak, Samawa, dan Mbojo (Sasambo) yang sekaligus merupakan penduduk asli pribumi 66%. Adapun etnik lain atau pendatang yang mendiami kepulauan Sumbawa di antaranya yaitu: Etnik Bali 3%, Bugis/ Makassar 1,24%, Jawa 9%, Sunda 0,13%, sedangkan yang lainnya lebih kurang 5%. Banyaknya etnik atau suku yang mendiami Kota Bima mendeskripsikan bahwa masyarakat Kota Bima merupakan masyarakat yang plural (Majemuk), yang tidak menutup kemungkinan

dengan pluralitas atau kemajemukan serta keragaman sosiokultural masyarakat yang ada, jika tidak dikelola dengan baik maka sewaktu-waktu akan dapat menjadi pemicu terjadinya konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang pernah terjadi pada beberapa desa atau Kelurahan di Bima yaitu konflik sosial antara warga Desa Ngali dan Desa Renda pada tahun 2000-2010, Konflik Desa Cenggu dan Desa Tente pada tahun 2011, Konflik sosial antara warga Desa samili dan dadibou pada tahun 2014, terakhir adalah konflik sosial antara warga Desa Risa dan Dadibou pada tahun 2016.

Dari sekian banyak konflik sosial yang terjadi di Bima peneliti tertarik meneliti Konflik sosial terjadi antara warga Kelurahan Dara dan warga Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima sekitar tanggal 16 Desember 2014 lalu. Dengan pertimbangan untuk mengkaji terjadinya konflik sosial antara dua kelurahan ini berdasarkan faktor masalah pelecehan warga Tanjung terhadap masyarakat Dara, atau memang ada faktor-faktor lain seperti faktor Menurut keterangan warga, salah satu warga Tanjung, bentrok tersebut berawal dari pertandingan sepak bola di Kelurahan Tanjung. Pertandingan sepak bola tersebut adalah pertandingan sesama warga Tanjung, namun terjadi penghinaan yang dilakukan salah satu warga Kelurahan Dara yang sedang menonton pertandingan, kepada pemain yang sedang bermain pada waktu itu. "Ah.. Percuma orang Tanjung sekolah, palingan jadi maling nih", dengan perkataan tersebut pemuda Tanjung merasa dirinya dilecehkan, setelah itu mereka menunggu permainan bola berakhir, untuk melakukan penyerangan terhadap pemuda Dara, setelah permainan bola berakhir para pemuda yang berasal dari Kelurahan Tanjung berkumpul dan setelah itu mereka melakukan penyerangan terhadap pemuda yang berasal dari Kelurahan Dara, sehingga konflik sosial antar pemuda tersebut merambat sampai ke wilayah etnis yakni warga Kelurahan Dara dan warga Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima..

Namun apa yang terjadi, aparat kepolisian berupaya untuk menenangkan konflik sosial antara warga Kelurahan Dara dan warga Kelurahan Tanjung, dengan memberikan tembakan peringatan, tetapi justru memperkeruh tekanan massa yang menyebabkan warga Kelurahan Tanjung melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian, akibat kecerobohan dalam melakukan penembakan yang menyebabkan tembakannya mengenai warga Kelurahan Tanjung, diantaranya terdiri 10 orang luka ringan. Dengan melihat intensitas serta eskalasi konflik sosial yang terjadi, dimana konflik disebabkan oleh suatu insiden yang menyebabkan pecahnya konflik sosial tersebut telah membawa implikasi pada kemarahan semua warga dua kelurahan yang berujung pada tindakan anarkis (pengrusakan, pembakaran) termasuk pembakaran pos Polisi yang ada di wilayah kompleks Istana Bima.

Ada beberapa hal penting yang perlu diketengahkan dalam mengurai dan menganalisis konflik sosial yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, yaitu mengenai beberapa fenomena 'Unik' yang muncul dalam konflik sosial tersebut, diantaranya, pembakaran kantor Pos Polisi yang dilakukan oleh warga Tanjung pada saat berlangsungnya aksi penyerangan diantara dua kelurahan, setelah itu terjadi juga konflik susulan yang disebabkan oleh aparat brimob, hingga mengakibatkan beberapa korban jiwa warga masyarakat kelurahan Tanjung, akibat dari tembakan membabitnya yang dilakukan oleh aparat Brimob tersebut.

Hal demikian seharusnya tidak perlu dilakukan oleh kepolisian karena bertentangan dengan tugas dan fungsi mereka sebagai lembaga pengayom, dan pelindung masyarakat. Kenyataan inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengangkat judul penelitian "Konflik Sosial Antara Warga Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Kota Bima.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Konflik Sosial

Istilah Konflik secara etimologi berasal dari bahasa latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian, “konflik” dalam kehidupan berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain, paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih (Setiadi dan Kolip, 2011: 347). Menurut Kamus Sosiologi (2007), konflik berarti percekocokan, perselisihan, pertentangan, (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya), dan konflik sosial adalah pertentangan antaranggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.

Konflik sosial merupakan kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dan akan selalu ada (Abdullah, 2006: 243). Kehadirannya bisa saja dibutuhkan karena dapat mendorong ke arah perubahan yang diperlukan bagi perkembangan individu atau pribadi, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini pada hakikatnya berkaitan dengan konflik yang berwujud dalam bentuk kekerasan yang menyebabkan kerusakan fisik, mental maupun sosial. Secara konseptual perlu dibedakan antara konflik sosial dan kekerasan.

Untuk memudahkan pemahaman serta memperoleh ketajaman dalam analisis hasil penelitian ini terkait dengan permasalahan yang diangkat, peneliti berpikir kiranya merupakan sesuatu yang krusial untuk menentukan kapabilitas teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik dengan memusatkan perhatian pada analisis Lewis A. Coser tentang fungsional konflik yang dikemukakannya. Adapun perspektif teoritis konflik lainnya merupakan pendekatan pendukung dalam menganalisis konflik sosial yang terjadi antara warga Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung di Kecamatan Rasanae Kota Bima.

Coser mulai dengan mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan menuntut status yang langka, kekuasaan dan sumber-sumber untuk mengeliminasi lawan yang dapat memperkuat struktur hubungan sosial. Dengan definisi semacam ini hal-hal yang esensial tidak perlu dipertentangkan. Perhatian Coser berkaitan dengan fungsi dan bukan dengan disfungsi konflik sosial. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa konsekuensi konflik sosial tersebut akan mengarah pada peningkatan dan bukan hanya kemerosotan, adaptasi atau penyesuaian baik dalam hubungan sosial yang spesifik maupun pada kelompok secara keseluruhan (Zeitlin, I. M. 1995: 156-157).

Konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembetulan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok, konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok, agar tidak lebur dalam kehidupan sosial sekelilingnya, Coser (dalam Poloma, 1994: 108).

1. Dampak positif konflik sosial dapat dilihat dalam ilustrasi kelompok yang sedang mengalami konflik dengan *out-group*.
2. Konflik sosial dengan *aut group* dapat memperkuat identitas kelompok, di sinilah fungsi positif konflik dalam memperkuat identitas *in group*.
3. Coser, dalam konsepnya tentang “Katup Penyelamat” (*safety value*).
4. Coser juga melihat demikian berfungsi sebagai “jalan keluar meredakan permusuhan.
5. Coser juga mengatakan, bahwa konflik merupakan proses penyatuan dan pemeliharaan terhadap kelompok dan struktur sosial.

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Konflik Sosial antara Warga Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung di Kecamatan Rasana'e Kota Bima.
2. Bagaimana upaya penyelesaian Konflik Sosial antara Warga Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung di Kecamatan Rasana'e Kota Bima.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan (Sugiyono, 2012).

Adapun dalam penelitian ini sesuai dengan masalah yang dikaji yaitu “Konflik Sosial Antara Warga Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima.”

Dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan karena peneliti bermaksud memperoleh penjelasan tentang Konflik Sosial Antara Warga Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, yang bertujuan mempelajari secara mendalam mengenai Konflik sosial.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan kota metropolitan. Kota Bima terletak di pesisir timur Pulau Sumbawa dan berbatasan dengan Selat Sumbawa di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Sumbawa di sebelah utara, Kabupaten Dompu di sebelah timur dan Kabupaten Bima di sebelah selatan.

Adapun penelitian ini dilaksanakan di Kota Bima khususnya di Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima yang difokuskan pada konflik sosial antara warga Kelurahan Dara dan Kelurahan Tannjung.

Sasaran penelitian atau yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para Pemerintah Kelurahan, tokoh agama, tokoh pemuda, masyarakat, Pak Rt/Rw, Babinsyah, dan aparat kepolisian yang mengetahui masalah yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mendapat 12 informan. Karena penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, maka dalam menentukan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Purposive Sampling merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. (Sugiyono : 2007).

Kriteria informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah sebagai berikut: Pemerintah Kelurahan, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, pak Rt/Rw, Babinsyah, dan aparat kepolisian

Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Maka dimulai dari perencanaan, pengumpulan dan analisis data serta penulisan laporan penelitian ini seluruhnya dilakukan oleh peneliti. Instrumen atau alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam rangka menggambarkan data yang relevan dengan aspek-aspek yang diteliti adalah meliputi : daftar cek pedoman wawancara, recorder, kamera, dan alat penunjang lainnya.

Metode pengumpulan data merupakan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode

pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Pengumpulan data berawal dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari hasil pengumpulan data baik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan upaya yang berlanjut dan berulang-ulang, data yang diperoleh di lapangan diolah dengan maksud dapat memberikan informasi yang berguna untuk dianalisis. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk memperoleh keabsahan data dari penelitian tentang konflik sosial antara warga Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima adalah dengan triangulasi. *Triangulasi is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data sources of multiple data collection procedures* (William Wiersma, 1986). Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber, untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan cara wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner.
3. Triangulasi waktu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dengan menggunakan waktu atau situasi yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima adalah salah satu Kecamatan yang terletak sebelah Barat Kota Bima, dengan jumlah penduduknya 6405 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 3202, dan perempuan 3203, dan jumlah KK 1721, dan memiliki 6 lingkungan antara lain Tolodara dengan jumlah penduduk 1561 jiwa terdiri dari 764 laki dan perempuan 797, Lingkungan Danatraha dengan jumlah penduduknya 845 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 470 penduduk perempuan 379, sementara lingkungan Dara memiliki penduduk 1555 penduduk dengan penduduk laki-laki 775, dan penduduk perempuan 783, lingkungan Binabaru memiliki penduduk sebanyak 967 dengan jumlah penduduk laki-laki 494, dan penduduk perempuan 573, lingkungan Wadumbolo memiliki penduduk sebanyak 597 dengan jumlah penduduk laki-laki 300 dan penduduk perempuan 297, lingkungan Ni'u dengan jumlah penduduk 773 dengan rasio penduduk laki-laki 399 dan penduduk perempuan 374, sedangkan lingkungan Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima adalah salah satu Kecamatan yang terletak sebelah Barat Kota Bima, dengan jumlah penduduknya 6418 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 3219, dan perempuan 3199, dan Jumlah KK 1650.

Jumlah Penduduk Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung

Sumber: Data Monografi Kantor dua Kelurahan 10 Februari 2017.

No	Nama Kelurahan	Jenis Kelamin		
		JKK	L	P
1	Dara	1721	3202	3203
2	Tanjung	1650	3219	3199
Jumlah		3371	6421	6402

2. Sistem Mata Pencaharian dan Perekonomian

Adapaun yang menjadi sistem mata pencaharian dan perekonomian masyarakat Kelurahan Dara dengan Kelurahan Tanjung yang ada di Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, hal ini dapat terlihat pada masyarakat dimana mata pencaharian mereka sebagai petani, PNS, Aparat Kelurahan, pengusaha, buru industry, buruh bangunan, buruh pertambangan, buruh perkebunan, pedagang, dan pengangkutan. Walaupun masyarakat Kelurahan Dara dengan masyarakat Kelurahan Tanjung melakukan pekerjaan ganda/ lebih dari satu bidang pekerjaan, seperti bertani bagi para PNS/Aparat Kelurahan, para petani bekerja. Masyarakat dua Kelurahan ini dalam bidang pertanian pun mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak seperti Kecamatan-Kecamatan lain di Kota Bima, karena lahan persawahan yang ada hanya sekitar 6.521 Hektar dengan lahan kering 5.504,50 Hektar. Sedikitnya lahan untuk persawahan ini di sebabkan letak geografis yang datar.

Mata pencaharian masyarakat yang ada di Kelurahan Dara dengan Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima sangat menentukan maju tidaknya suatu perekonomian yang berkembang pada masyarakat dua Kelurahan, ada beberapa indikator mengapa perekonomian masyarakat dua Kelurahan dan sekitarnya masih dalam tahap sederhana antara lain:

- a. Sumber pendapatan yang relatif.
- b. Letak geografis pusat Kota.

3. Falsafah Hidup Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung

Masyarakat Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima sebagaimana juga masyarakat Indonesia lainnya memiliki falsafah hidup yang menjadi ciri khasnya. Falsafah hidup juga dapat menjadi etos kerja dan menciptakan masyarakat Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima yang solid. Adapun ungkapan masyarakat Kecamatan, yang kemudian menjadi falsafah hidup mereka adalah sebagai berikut:

1) Ungkapan Maja Labo Dahu (Malu Dan Takut).

Secara terminologis, Maja Labo Dahu mengandung arti takut. Ismail (1997; 2001) mengartikan "maja" (malu), "labo" (dengan), "dahu" (takut). *Maja* (malu) bagi yang beriman dan dahu (takut) bagi yang bertakwa, anggota masyarakat akan merasa malu dan takut melanggar sistem budaya (*sara ro huku*) dan norma Agama. Kedua kata ini memiliki makna kultural yang utuh yang tidak bisa di pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Apabila kata "*maja*" saja yang ada dan kata "*dahu*" hilang maka *maja* secara kultural tidak memiliki makna seperti yang terkandung dalam *Maja Labo Dahu* demikian juga sebaliknya.

Maja labo dahu (malu dan takut) pada dasarnya adalah kearifan lokal masyarakat Kota Bima. Pada masyarakat Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima kalimat *maja labo dahu* (malu dan takut). Dari hasil wawancara dengan bapak Abdul Gani selaku masyarakat Kelurahan Dara tentang makna malu dan takut (*maja labo dahu*) sebagai berikut:

Malu menurut masyarakat Dara dan masyarakat Tanjung yaitu malu jika tidak berkerja, malu jika melanggar hukum adat. Dan orang Dara memiliki rasa takut yang dipahami oleh masyarakat Dara dan Tanjung ialah “Takut” dalam perintah agama, adat, pemerintah dan melakukan kesalahan-kesalahan lainnya. Masyarakat Dara dan Tanjung secara turun-temurun menasehati anaknya yang pergi keluar Kota, atau memulai hidup baru atau menikah untuk selalu malu dan takut. (Wawancara Abdul Gani, 42 Tahun 22 Februari 2017).

2) Ngaha Aina Ngoho (makan tapi jangan berladang liar)

Makan tapi jangan berladang liar (*Ngaha aina ngoho*) secara terminologis terdiri dari tiga kata yaitu “*ngaha*” (makan), “*aina*” (jangan) dan “*ngoho*” (berladang liar), yang dapat diartikan bahwa dalam mencari nafkah tidak boleh merusak hutan. Ungkapan ini adalah salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Dara dengan masyarakat Tanjung dan ungkapan ini di terapkan dan mengakar di masyarakat Dara dan Tanjung dalam menjaga kelestarian hutan tempat mereka hidup.

Masyarakat Dara dan Tanjung dalam usaha menjaga kelestarian hutan menerapkan suatu aturan hukum adat yang apabila ada warganya yang menebang satu pohon maka warga tersebut harus menanam kembali minimal satu pohon di tempat yang sama, agar hutan tetap terjaga kelestariannya. Hal ini terus dipertahankan oleh masyarakat Dara dan Tanjung hingga sekarang. Sebagaimana hasil Wawancara bersama tokoh budaya Kecamatan Rasana’e Barat Kota Bima Dara dan Tanjung Bapak Usman/Abu Moa sebagai berikut:

“Masyarakat Dara dan Tanjung dulu melakukan peladangan liar dengan berladang berpindah-pindah, sehingga pemerintah dan tokoh adat pada saat itu memunculkan kalimat “ngaha aina ngoho” untuk mengajak masyarakat untuk tidak melakukan peladangan liar. Adapun aturan adat istiadat dulu bagi masyarakat Dara dan Tanjung, mana yang menjadi keputusan adat tidak bisa dirubah misalnya, masyarakat Dara dan Tanjung tidak ingin melihat orang yang melakukan pelanggaran seperti melakukan perzinahan dan ada hukuman dengan menghancurkan semua tanaman, dan binatang ternak. (Menurut penuturan Usman/Abu Moa 71 tahun 14 Februari 2017)”

3) Karakteristik Informan

Berdasarkan karakteristik informan. Peneliti menggunakan Purposive Sampling, peneliti telah memilih dan memilah informan dengan karakteristik yang telah peneliti tentukan khususnya informan baik tokoh masyarakat/tokoh agama. Di samping itu pula terpilihnya informan karena memiliki pengetahuan/ pemahaman yang bisa memberikan data yang kredibilitas.

Dalam penelitian ini, penulis tetapkan 12 orang yang menjadi informan di antaranya Tokoh masyarakat/tokoh agama 5 orang, Aparat kepolisian 4 orang, tokoh pemuda 3 orang.

B. Hasil Penelitian

1. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sosial Antarwarga Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung.

Pada mulanya, terjadinya konflik sosial pertama antara warga Kelurahan Dara dan warga Kelurahan Tanjung di Kecamatan Rasana’e Barat Kota Bima itu diawali masalah konflik anak SMA Muhammadiyah dan SMA PGRI Kota Bima, tetapi konflik sosial tersebut dapat terselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak pemerintah, baik pemerintah Kelurahan Dara maupun pemerintah Kelurahan Tanjung, selanjutnya konflik sosial kedua terjadi di lapangan sepak bola *Mangge Maci* antar pemuda lantaran konflik sosial tersebut berawal dari hal sepele.

Konflik sosial yang terjadi merupakan konflik sosial yang kedua kali, sehingga dengan konflik sosial kedua kelurahan tersebut, mengharuskan aparat kepolisian turun tangan untuk menyelesaikan konflik sosial masyarakat Dara dan masyarakat Tanjung. Namun apa yang terjadi, aparat kepolisian berupaya untuk menenangkan konflik sosial antara warga Kelurahan Dara dan warga Kelurahan Tanjung, dengan memberikan tembakan peringatan, tetapi justru memperkeruh tekanan massa yang menyebabkan warga Kelurahan Tanjung melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian, akibat kecerobohan dalam melakukan penembakan yang menyebabkan terbakarnya mengenai warga Kelurahan Tanjung, diantaranya terdiri 10 orang luka ringan. Sebagaimana hasil wawancara diantaranya sebagai berikut: “Konflik sosial terjadi berawal dari permasalahan anak SMA Muhammadiyah dengan SMA PGRI Kota Bima” (Wawancara dengan Bapak Ilias Alwi selaku tokoh agama Kelurahan Dara, 10 Februari 2017).

2. Upaya Penyelesaian Konflik Sosial Antarwarga Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi antara warga Kelurahan Dara dengan Kelurahan Tanjung, namun akhir-akhir ini konflik sosial masih sering terjadi meskipun konflik sifatnya tidak terbuka dan berpengaruh lagi kepada masyarakat luas. Peran pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kapolres Kota Bima, dan tokoh masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik sosial warga Kelurahan Dara dengan warga Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima:

a. Pemerintah

Untuk menangani konflik sosial yang semakin menajam pemerintah menempuh langkah-langkah yang bersifat struktural menggunakan cara yang mengedepankan sanksi yang lebih keras dan menggunakan instrumen senjata, polisi, penjara dan pengadilan untuk memaksakan suatu keadaan agar stabil. Cara penanganan secara struktural menempuh jalur hukum dan menempatkan aparat keamanan di lokasi konflik sosial.

Aparat yang bertugas menempuh berbagai sistem atau jalur penyelesaian dalam menjalankan tugasnya diantaranya bersifat preventif. Penanganan yang bersifat preventif yang dimaksudkan adalah usaha untuk melokalisir konflik sosial untuk meredakan ketegangan yang dilakukan oleh aparat keamanan bersama pemerintah dan tokoh masyarakat dari kelompok yang bertikai. Upaya preventif ini diarahkan untuk menetralsir keadaan agar konflik sosial dapat redah dan peristiwa yang sama tidak terulang kembali.

Berdasarkan hasil wawancara di atas konflik sosial merupakan benturan, antara kedua belah pihak yang saling berselisih baik secara horizontal maupun secara vertikal. Konflik sosial tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang dapat merugikan, tetapi juga dapat dilihat sebagai sesuatu yang baik bagi kehidupan masyarakat. Interaksi masyarakat merupakan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok, adapun syarat-syarat terjadinya interaksi sosial diantaranya, adanya kontak sosial dan komunikasi, hal ini sangat penting untuk mengawali proses interaksi sosial dalam menjalin hubungan antar masyarakat. Hubungan masyarakat yang satu dengan yang lain dapat bersifat asosiatif dan disosiatif. Ini dapat kita lihat pada interaksi sosial dari kedua Kelurahan yakni Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima. Interaksi sosial yang terjalin antara kedua kelurahan tersebut bersifat disosiatif, yang berefek pada konflik sosial, sehingga mengharuskan pemerintah untuk turun tangan dalam upaya penyelesaian konflik sosial yang terjadi.

b. Penegakan Hukum

Penanganan konflik sosial warga Kelurahan Dara dengan warga Kelurahan Tanjung lewat jalur hukum diperlukan untuk mempertegas penyimpangan-penyimpangan selama konflik sosial. Ketentuan yang jelas dan tegas disertai sanksi yang mengikat sangat diperlukan dengan tujuan bukan hanya menghukum, melainkan menyadarkan kembali seseorang dari ketidaksadarannya.

Dalam penyelesaian konflik sosial antar warga Kelurahan Dara dengan warga Kelurahan Tanjung, aparat Negara selain menegakkan hukum yang direalisasikan dengan adanya putusan yang menetapkan kekuatan hukum, juga ditempuh jalur rekonsiliasi. Konflik sosial warga Kelurahan Dara dengan warga Kelurahan Tanjung mengharuskan pihak yang berwajib untuk ikut turun tangan, mengambil langkah-langkah dengan berbagai pertimbangan dalam upaya penyelesaian konflik sosial yang tengah terjadi diantara kedua Kelurahan tersebut. Aparat kepolisian memandang konflik sosial yang terjadi sangat merugikan bagi orang banyak, ketegangan, kecemasan, bahkan ketakutan, selalu muncul dan menghambat segala aktifitas keseharian, baik dalam bentuk yang sifatnya manifest maupun bersifat laten.

c. Peran Tokoh Agama (*Mediator Perdamaian*)

Islam Adalah Agama Rahmatan Lilalamin, Damai dan Penuh Toleransi. Konflik sosial dan kerusuhan yang hampir tiada henti di Indonesia seperti yang terjadi konflik sosial yang ada di Kota Bima dan Kabupaten Bima, khususnya konflik sosial yang ada di Kelurahan Dara dengan Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, Sebagai masyarakat religius yang mencantumkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai landasan utama hidup bermasyarakat.

Kalangan tokoh agama dituntut memainkan peran utama untuk meredam konflik sosial yang kerap terjadi di tengah masyarakat, Konflik sosial sesungguhnya adalah bagian dari kehidupan masyarakat, tapi ada peran kunci seorang tokoh agama di tengah masyarakat yang bisa dimainkan guna mencegah terjadi konflik sosial. Ia memberikan saran agar pencegahan konflik sosial juga dimulai dari keluarga dengan mengajarkan anak menjauhi perbuatan kriminal dan mengajarkan kepada anak mana perbuatan yang benar dan salah. Kemudian pentingnya sinergitas antarlembaga dan instansi. "Setiap lembaga perlu melakukan langkah-langkah terpadu yang diperlukan untuk mencegah kriminalitas dan konflik sosial. Punya keprihatinan yang tulus dan mendalam atas situasi yang ada:

1. Memiliki kesadaran dan rasa tanggungjawab yang tinggi, turut mengambil tanggungjawab, walaupun bukan merupakan penyebab/sumber konflik)
2. Informan: mencari dan menyalurkan informasi secara cepat, tepat, jelas.
3. Komunikator mengupayakan kesadaran dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan, martabat dan hak asasi manusia, tata tertib atau aturan hidup bersama (*Hukum*) serta keutamaan-keutamaan seperti keadilan, kebenaran, kejujuran dan cinta kasih.
4. Stabilisator menjadi penyalaras, pengimbang, penyejuk, dengan tetap menjaga netralitas, memperjuangkan kebaikan umum untuk semua pihak
5. Motivator, memberi pencerahan, jalan, semangat dan penguatan bagi semua pihak untuk tetap berjuang demi perdamaian dan kebaikan umum.
6. Fasilitator, memfasilitasi dan mengawal pelbagai aktivitas untuk perdamaian dan kebaikan umum.

d. Tokoh Masyarakat dan Pemuda

Motif terjadinya konflik sosial dapat bermacam-macam diantaranya berupa, persaingan secara ekonomis, perbedaan keyakinan, persaingan politik, kesenjangan sosial, kenakalan remaja, dan masalah sepele di kalangan pemuda.

Akhirnya perlu ditegaskan di sini, bahwa konflik sosial bagaimanapun kecilnya harus segera ditanggulangi agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bangsa dan negara. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan konflik sangat diperlukan, baik yang bersifat pencegahan maupun penanganan kasus. Dalam proses penanggulangan konflik oleh masyarakat diperlukan strategi-strategi tertentu antara lain, melalui penyuluhan, pemberdayaan pranata lokal, mewujudkan integrasi nasional. Apapun motifnya setiap konflik sosial harus dapat dicegah dan diatasi. Dalam rangka penanggulangan terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah sesungguhnya telah melakukan berbagai kebijakan, diantaranya dengan mengeluarkan undang-undang khusus penanganan konflik sosial, yakni UU Nomor 7 tahun 2012 dengan aturan pelaksanaannya, yakni PP No 2 tahun 2015, serta sejumlah peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri, diantaranya Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, Permendagri No 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

e. Tokoh Adat (Budaya)

Model penanganan kultur yang diterapkan di daerah konflik sosial antar warga Kelurahan Dara dengan warga Kelurahan Tanjung ditempuh dengan memanfaatkan perangkat budaya, baik lembaga adat dan norma-norma yang secara historis diterima oleh semua pihak maupun lembaga keagamaan. Kerangka penanganan kultur yang telah dilaksanakan berupa upacara adat dan bimbingan rohani yang dihadiri oleh pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sekitarnya.

Jalannya prosesi upacara perdamaian pada konflik sosial antar warga Kelurahan Dara dengan warga Kelurahan Tanjung diawali dengan pembacaan do'a yang dilakukan oleh parewa syara' (petugas agama) baik agama Islam maupun Kristen. Setelah Do'a selesai, maka parewa syara' diharuskan makan manis-manisan dengan tujuan bahwa warga yang akan berdamai dilakukan setulus hatinya atau semanis gula yang dimakan oleh parewa syara'. Upacara pembacaan do'a keselamatan adalah merupakan simbol kebulatan tekad dan harapan atau do'a dari segenap lapisan warga Kelurahan Dara dengan warga Kelurahan Tanjung dalam memohon ketentraman dan kedamaian.

Kemudian dilanjutkan dengan menyembelih empat ekor kerbau sebagai simbol penolak datangnya abala' (musibah) atau konflik sesuai dengan empat arah mata angin, yakni utara, barat, selatan dan timur. Pemotongan kerbau dilakukan oleh pemangku adat dalam hal ini kepala adat dengan diawali penyebutan peristiwa konflik sosial satu persatu sampai konflik sifatnya luas dan terbuka. Setiap menyebutkan kasus konfliknya dipecahkan sebutir telur sebagai simbol rasa penyesalan masa lalu. Setelah penyesalan atas perbuatan-perbuatan di masa lalu diucapkan semua, maka disembelihlah kerbau-kerbau itu sebagai pengorbanan diri dari pihak-pihak yang terlibat konflik sosial dan para pemimpin, tokoh agama dan tokoh adat yang menyesali kelemahannya dalam menjaga kenteraman masyarakatnya.

f. Media Massa

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi tingkat perkembangan media massa, informasi yang diedarkan oleh media massa akan tersalurkan ditengah masyarakat, respon masyarakat begitu cepat dalam menyimak dan bertindak pada isu-isu yang beredar. Media menjadi alat yang tercepat mempengaruhi corak berpikir masyarakat demokratis. Selain sebagai sarana informasi pada publik, media massa juga menjalankan fungsi ekonomi, control sosial, menghibur dan edukasi pada masyarakat. Hal itulah yang membuat media massa menjadi penting untuk dipastikan dapat menjalankan peranannya

sehingga turut serta memberikan kontribusi dalam membangun bangsa (UU Pers No. 40 Tahun 1999). Bahkan, begitu kuatnya posisi media massa telah membuatnya diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan politik keempat selain Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif. Paska dicabutnya sejumlah kebijakan repesif dalam rangka pengawasan media massa seperti mekanisme sensor dan pembredelan, pertumbuhan media massa secara nasional berkembang pesat Pasca Orde Baru. Hal ini juga, telah membuka kran bagi munculnya wajah baru media massa dalam semangat kebebasan pers. Baik media massa cetak maupun elektronik menjamur bak cendawan di musim hujan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Namun demikian, perkembangan ini dihadapkan pada realitas adanya kondisi objektif yang tidak sama antar wilayah atau daerah. Pada level nasional, infrastruktur serta sumber daya manusia sangat mendukung perkembangan media massa ini. Akan tetapi, kondisi ini dirasakan disejumlah daerah, terutama kawasan perbatasan maupun daerah dengan intensitas konflik sosial dan kriminal sangat tinggi. Hal ini tentu berpengaruh terhadap optimalisasi fungsi media massa sebagai salah satu asset nasional yang penting bagi pembangunan bangsa.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Akhirnya perlu ditegaskan di sini, bahwa konflik sosial bagaimanapun kecilnya harus segera ditanggulangi agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bangsa dan negara. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan konflik sangat diperlukan, baik yang bersifat pencegahan maupun penanganan kasus. Dalam proses penanggulangan konflik oleh masyarakat diperlukan strategi-strategi tertentu antara lain, melalui penyuluhan, pemberdayaan pranata lokal, mewujudkan integrasi nasional. Apapun motifnya setiap konflik sosial harus dapat dicegah dan diatasi. Dalam rangka penanggulangan terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah sesungguhnya telah melakukan berbagai kebijakan, diantaranya dengan mengeluarkan undang-undang khusus penanganan konflik sosial, yakni UU Nomor 7 tahun 2012 dengan aturan pelaksanaannya, yakni PP No 2 tahun 2015, serta sejumlah peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri, diantaranya Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, Permendagri No 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Menurut peraturan tersebut, penanganan konflik sosial bukan saja menjadi tanggung jawab aparat keamanan atau pemerintah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan konflik bahkan sangat penting terutama dalam upaya penyelesaian secara damai. Peran serta masyarakat dalam penanganan konflik sosial dalam UU Nomor 7 tahun 2012 dan PP No 2/2015 diatur di dalam Bab tersendiri yakni Bab VII UU No. 7/2012 dan Bab VI PP No 2/2015.

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2012, penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Yang dimaksud dengan Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan

memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengungkapan fakta-fakta di lokasi penelitian yang diperoleh dari berbagai informan tentang Konflik sosial Antara warga Kelurahan Dara dan warga Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab terjadinya konflik sosial antara warga Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung pada awalnya dipicu oleh Konflik anak SMA Muhammadiyah bersama SMA PGRI Kota Bima.
2. Proses terjadinya konflik sosial yang berkelanjutan dipicu oleh dendam di antara warga yang berkonflik dan saling membalas. Apabila kerugian yang diderita akibat konflik belum dianggap seimbang dengan yang dialami oleh pihak lawan, maka akan terjadi konflik susulan sebagai wujud pembalasan, sehingga terkadang konflik berhenti dengan sendirinya pada titik tertentu karena kelompok warga yang bertikai telah merasaimbang (stalemate).
3. Berbagai upaya penyelesaian konflik sosial telah dilakukan baik dengan cara penanganan struktural dan jalur hukum maupun penanganan konflik secara kultur, belum ada yang efektif. Hal ini terbukti dengan adanya konflik sosial yang masih sering terjadi kapan dan dengan siapa saja di lokasi penelitian.

Melihat berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik belum ada yang efektif, maka peneliti menyarankan beberapa upaya penyelesaian konflik sebagai berikut:

1. Pembinaan Generasi Muda

Pembinaan generasi muda dengan cara menjalin komunikasi yang kondusif antara orang tua, pemerintah dengan pemuda atau remaja dengan melibatkan pemuda atau remaja dalam kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan. Menggalakkan organisasi kepemudaan atau remaja, seperti karang taruna, remaja mesjid dan lain-lain.

2. Memfungsikan Semua Lembaga

Dalam usaha menciptakan keadaan yang kondusif dalam mengatasi konflik, semua sistem kelembagaan pemerintah harus mengaktifkan kembali lembaga pemerintah dan lembaga adat yang selama ini cedera atau bahkan mati suri. Lembaga-lembaga seperti RT, RW, dan organisasi kepemudaan serta pemangku adat difungsikan kembali untuk kepentingan kontrol sosial masyarakat dan memberi masukan-masukan bagi usaha konsiliasi, dengan dukungan para orang tua.

3. Pemberantasan miras

Pemerintah Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, khususnya pemerintah Kelurahan Dara dengan Kelurahan Tanjung harus menyadari sepenuhnya bahwa pengaruh minuman keras merupakan pemicu utama terjadinya konflik antarwarga. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menetapkan peraturan daerah tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan serta pemberantasan pesta miras. Pemerintah harus proaktif untuk melaksanakan peraturan pemberantasan miras tersebut sehingga dapat terlaksana secara kontinyu, berkesinambungan dan konsekwen.

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penyediaan Lapangan Kerja dan Sarana Penyaluran Bakat.

Pemerintah harus melakukan pencegahan konflik sosial melalui upaya pengurangan angka penganggauran, hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia

(SDM) melalui penyediaan sarana pendidikan, yaitu dengan pembangunan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Kejuruan serta program perluasan lapangan kerja.

5. Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsekwen

Pemerintah daerah harus berani, tegas, konsisten dan konsekwen dalam menegakkan hukum, bertindak cepat dan tepat jika mengetahui adanya gejala konflik sosial antarwarga mulai dengan tindakan preventif, kuratif, dan refresif yang sifatnya persuasif bahkan jika perlu dengan cara koersif, tanpa ada pengecualian di seluruh lapisan warga masyarakat Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I., Wening, U., & Hasse, J. 2009. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: Tici Publications Bekerjasama Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PT Prenada Media Group.
- Coser, 1986. Membagi konflik dalam dua bentuk. *Konflik Realitas dan Konflik Non-Realitas*.
- Ely, M. Setiadi dan Usman Kolip. 2010. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Bandung: Kencana Prenada Media Group.
- Fisher, Simon. 2001. *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: British Council.
- Hasan, Sadili. 1984. *Kamus Sosiologi*. Surabaya: PT. Arkola.
- Kun Maryati & Juju Suryawati 2007. *Sosiologi Suatu Kajian masyarakat*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Krida, Laksana dan Hari Murti. 2003. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Kusnadi. 2003. *Teori dan Manajemen Konflik*. Malang: Gramedia.
- Lewis, A. Coser. 1984. *The Function of Social Conflict*.
- Lili, Weri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKIS.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasikun. 2012. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Nasir, N. 2009. *Teori-Teori Sosiologi*. Bandung: PT Tim Widya Padjadjaran.
- Poloma, M. M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raho, B. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: PT Prestasi Pustaka.
- Razmal Muin. 2009. *Konflik Sosial Antara Masyarakat Rongkong dan Masyarakat Baebunta di Kabupaten Luwu Utara*. Palopo: LPS STAIN Palopo.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Satori dan Komariah, Aan. 2010 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Setiadi, M. E. & Usman K. 2011. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Simon, Fisher, Dkk. 2000. *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: British Council.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Yudistira.
- _____. 1990, *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Suyanto, B. dan Sutinah. (Eds.). 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Grup.
- Ujan, A. 2011. *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama Dalam Perbedaan*. Jakarta: PT. Indeks.
- Zeitlin, 1995. *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik Terhadap Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- UU Nomor 7 tahun 2012, yakni *PP No 2 Tahun 2015*, No. 2 Tahun 2013 Tentang *Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri*
- UU Nomor 7 Tahun 2012 dan *PP No 2/2015 diatur di dalam Bab tersendiri yakni Bab VII UU No. 7/2012 dan Bab VI PP No 2/2015*.
- UU Nomor 7 Tahun 2012, *Penanganan Konflik*.